**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1. Kajian Pustaka**

Pada kajian pustaka ini peneliti akan membahas teori-teori yang mendasari penelitian ini yang meliputi grand theory, middle theory dan micro theory maupun hasil penelitian sebelumnya. Adapun yang merupakan Grand theory dari penelitian ini adalah teori manajemen. Middle theory adalah konsep dari teori tentang manajemen mutu pendidikan dan aply theory yaitu tentang pengembangan kurikulum, kompetensi guru , mutu proses dan capaian KKM guru.

* + 1. **Manajemen**
       1. **Pengertian Manajemen**

Secara bahasa atau etimologi manajemen disadur dari bahasa Perancis Kuno yaitu *ménagement* yang artinya adalah seni melaksanakan serta mengatur. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi *profit* maupun *non profit*.

Definisi manajemen yg dikemukakan oleh Daft (2003:4) sebagai berikut:

“*Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading and controlling organizational resources”.*

Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi.

Plunket dkk.(2005:5) mendefinisikan manajemen sebagai berikut :

“*One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions* (*planning organizing staffing leading and controlling*) *and coordinating various resources* (*information materials money and people*)”.

Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan. Pengertian manajemen secara umum, manajemen secara etimologi berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Manajemen merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien.

Pengertian manajemen menurut Mulayu S.P. Hasibuan (2000:2), yaitu manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2000:10) bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan. **Richard L. Daft (2002:8), menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan** efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya organisasi. Menurut Sudjana (2000:77), manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaanya memiliki hubungan saling keterkaitan dengan lainnya.

**2.1.1.2.      Fungsi manajemen**

Fungsi-fungsi manajemen dipelajari untuk menelaah masalah-masalah manajemen, berikut adalah fungsi-fungsi manajemen yaitu :

1.      Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. gangguan atau hambatan

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah usaha antar manusia dalam suatu kelompok secara kerjasama sesuai dengan tujuan organisasi.

1. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.

1. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian adalah suatu usaha yang dilakukan pimpinan untuk mengatur, menyatukan, menserasikan, megintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

1. Pengkomunikasikan atau komunikasi

Pengkomunikasian atau komunikasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang terjadi di dalam lembaga maupun hal-hal di luar lembaga yang ada kaitannya dengan kelancaran tugas untuk mencapai tujuan bersama.

1. Pengawasan

Pengawasan adalah usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan.

Lebih jauh lagi, dijelaskan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapa tujuan pendidikan secara berkualitas.

* + 1. **Manajemen Mutu** 
       1. **Pengertian Manajemen Mutu**

Pengertian mutu, mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Purnama (2006:51) mengemukakan TQM (Management Mutu) ialah sistem terstruktur dengan serangkaian alat, teknik, dan filosofi yang didesain untuk menciptakan budaya perusahaan yang memiliki fokus terhadap konsumen, melibatkan partisipasi aktif para pekerja, dan perbaikan kualitas yang berkesinambungan yang menunjang tercapainya kepuasan konsumen secara total dan terus-menerus. Gaspersz (2008:266) mengemukakan TQM (Management Mutu) ialah pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah, guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dari perusahaan. Adapun batasan manjemen mutu itu sendiri yaitu Menurut Ishikawa dalamM. N.Nasution (2001), manajemen mutu adalah gabungan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, *teamwork*, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Definisi lainnya mengatakan bahwa manajemen mutu merupakan suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran‐sasaran mutu yang direncanakan. Jadi sistem manajemen mutu adalah tatanan yang menjamin kualitas output dan proses pelayanan/produksi. Manajemen mutu juga diartikan sebagai sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang berfokus pada pada orang/ karyawan. Manajemen mutu sendiri mempunyai tiga unsur utama, seperti yang dinyatakan oleh M. N. Nasution (2001) yaitu :

* + - * 1. Strategi nilai pelanggan ; nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang/jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya.
        2. Sistem organisasional ; sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan.
        3. Perbaikan kualitas berkelanjutan ; perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan.

Aplikasi teknik-teknik peningkatan mutu yang didasarkan pada data kualitatif dan kuantitatif yaitu :

1. Upaya pemberdayaan semua komponen sekolah

2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu sangatlah diperlukan dalam dunia pendidikan dimana semua aktifitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan dan tanggung jawab, serta melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu. Manajemen mutu merupakan gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun berdasarkan konsep kualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam hal ini siswa dan orang tua/ masyarakat.

**2.1.3. Pengembangan Kurikulum**

* + - 1. **Pengertian Kurikulum**

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa Latin, curriculum yang berarti bahan pengajaran. Pendapat lain mengatakan “kurikulum” berasal dari bahasa Latin, a little racecourse (suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olah raga), yang kemudian dialihkan kedalam pengertian pendidikan menjadi circle of instruction yaitu suatu lingkaran pengajaran, di mana guru dan murid terlibat di dalamnya.

Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Secara filosofi, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9 memberikan pengetian kurikulum sebagai seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional.

Nana Sudjana (2005:7) menyatakan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan kedalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat didalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Sedangkan menurut Hamalik (2008:91) bahwa kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani oleh peserta didik untuk mencapai kemampuan yang telah direncanakan, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya Syaibani dalam M. Mustari (2014:53) menyatakan kurikulum adalah sejumlah pengalaman, pendidikan, budaya, sosial, olah raga dan seni yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar kelas dengan maksud mendorong /memotivasi untuk berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dan dapat mengubah tingkah laku yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Wiryokusumo dalam Mustari, (2014: 52) menyatakan kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi perlu dipelajari dan pengalaman belajar perlu dijalani untuk mencapai kemampuan peserta didik.

* + - 1. **Pengertian Pengembangan kurikulum**

Pengertian pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perwujudan prinsip, aspek dan konsep kurikulum terletak pada guru, sehingga guru memiliki tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan kurikulum itu sendiri. Oleh sebab itu, seorang pelaksana kurikulum perlu mengetahui dan melaksanakan   beberapa landasan dan prinsip-prinsip menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum. Dalam Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut : (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan, (f) belajar sepanjang hayat, dan (g) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan sebagai berikut : (a) pelaksanan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya, (b) kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu : (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, (c) Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan atau percepatan, (d) kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, (e) kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, (f) kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya, (g) kurikulum mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri.

Pengembangan kurikulum menurut Suparlan (2011:79) adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (curriculum developer) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Adapun menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:150), menyebutkan Pengembangan kurikulum merupakan perencana, pelaksana, penilai dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat.

Sedangkan menurut Oermar Hamalik (2010:90) yang dikutip Uruh &Uruh mengembangkan defenisi pengembangan kurikulum yakni : “Curriculum development : problems, process, and progress is aimed at contemporary circumatances and future projections“ sesuai dengan pengertian diatas, pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan berbagai abstraksi yang seringkali mendominasi penulisan kurikulum, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian-penyesuaian lain yang dianggap penting”.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengembangan kurikulum itu harus sesuai dengan konsep yang akan ditempuh atau dipilih oleh suatu lembaga agar pengembangan kurikulumnya dapat terarah dan terukur. Berikut ini landasan- landasan dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses pengembangan kurikulum.

1. Landasan Pengembangan Kurikulum

Penggunaan landasan yang tepat dan kuat dalam mengembangkan kurikulum harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pengembang kurikulum ditingkat operasional (satuan pendidikan), yaitu para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan (supervisor) dewan sekolah atau komite pendidikan dan para guru serta pihak-pihak lain yang terkait (stake holder). Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum di Indonesia yang harus diacu adalah filsafat pendidikan pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan arah sedangkan pelaksanaanya melalui pendidikan.

1. Landasan Psikologis

Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Terdapat Sembilan aspek psikologi yang kompleks tetapi satu yang dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum, yaitu : aspek ketakwaan, aspek cipta, aspek rasa, aspek karsa, aspek karya (kreatif), aspek kesehatan, aspek sosial, aspek individu, landasan sosial budaya.

1. Landasan Yuridis

Kurikulum pada dasaranya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan menteri Pendidikan Nasional RI. Dengan demikian landasan yuridis pengembangan kurikulum ini adalah UUD 1945 (pembukaan alinea IV dan pasal 31), UU tentang pendidikan UU No.20 Tahun 2003. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional memerlukan langkah dan strategi yang harus dikaji berdasarkan analisis yang cermat dan teliti. Analisis dilakukan terhadap tuntutan kompetensi yang tertuang dalam rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Analisis mengenai kebutuhan dan potensi peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Analisis peluang dan tantangan dalam memajukan pendidikan pada masa yang akan datang dengan dinamika dan kompleksitas yang semakin tinggi.

Penjabaran Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan melalui pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran umum dengan mengembangkan SK-KD menjadi indikator, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian. Penjabaran lebih lanjut dari silabus dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata (2001 : 45-48) dibagi kedalam dua kelompok, yaitu :

1. Prinsip umum; relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis dan efektivitas.
2. Prinsip khusus; berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, media alat pelajaran, prinsip kegiatan penilaian.

Asep Heri Hernawan dkk (2002 : 55-56) mengemukakan lima prinsip dalam mengembangkan kurikulum, yaitu :

1. Prinsip relevansi, yaitu kurikulum itu memiliki hubungan dengan komponen kurikulum yang lainnya (tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi)
2. Prinsip fleksibilitas, dalam pengembangan kurikulum diharapkan bersifat luwes.
3. Prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horisontal.
4. Prinsip efisiensi, pengembangkan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya dan sumber lainnya.
5. Prinsip efektivitas, pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa ada kegiatan yang mubazir.
   * 1. **Sumber Daya Manusia**
        1. **Pengertian Sumber Daya Manusia**

Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi.

Menurut Malayu Hasibuan (2003:244), sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencangkup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya. Sedangkan menurut Sonny Sumarsono (2003:4), Sumber Daya Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Sementara menurut Mary Parker Follett (dalam Kurniawan Saefullah, 2010:5), menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu seni untuk tujuan -tujuan organisasi melalui pengaturan orang - orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Definisi ini, yang dikemukakan oleh Mary Parker Follett, mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan - tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlakukan, atau dengan kata lain dengan tidak melakukan pekerjaan- pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya menurut Mathis dan Jackson (2006:3), bahwa Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

* + - 1. **Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Persaingan antar sekolah di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk terus menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. SDM harus mampu menjadi manusia-manusia pembelajar yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan-perubahan. Pendapat Simamora dalam buku Sutrisno (2009:5) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Selanjutnya menurut Dessler menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Cushway (dalam Sutrisno, 2009 : 7), meliputi : memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal; mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya; membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM; memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya; menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya; menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi; bertindak sebagai pemelihara standar organisasional den nilai dalam manajemen SDM. Sementara itu menurut Schuler et al. (dalam Sutrisno, 2009: 8), manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama, yaitu (1) memperbaiki tingkat produktivitas, (2) memperbaiki kualitas kehidupan kerja, dan (3) meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal.

Sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan yakni pembentukan manusia yang berkualitas tinggi sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam proses pendidikan guru memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik kearah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan ujung tombak pendidikan. Demikian pula dengan MSDM dalam ruang lingkup sekolah sangat diperlukan terutama dalam pengelolaan guru sebagai pemangku tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan.

**2.1.5. Kompetensi Guru**

**2.1.5.1. Pengertian Kompetensi**

Kompetensi secara harfiah berasal dari kata competence, yang berarti kemampuan, wewenang dan kecakapan. Dari segi etimologi, kompetensi berarti segi keunggulan, keahlian dari perilaku seseorang pegawai atau pemimpin yang mana punya suatu pengetahuan, perilaku dan ketrampilan yang baik. Berikut ini beberapa pengertian kompetensi, yaitu :

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) bahwa competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance. Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja.

Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan

konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 5). Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah : kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan seseorang tiada lain adalah guru.

**2.1.5.2. Pengertian Kompetensi Guru**

Seorang guru dalam melaksanakan perannya dalam mendidik, mengarahkan, membimbing siswa untuk mencapai kompetensi yang berguna untuk dirinya dan masyarakat dituntut harus memiliki kompetensi yang disebut dengan kompetensi guru. Berikut ini beberapa pengertian kompetensi guru menurut para ahli, yaitu : Menurut Nana Sudjana ( 2002 :17), “ Kompetensi guru merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru”. Sementara menurut Samana (Martinis, 2010:7) menyatakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Mulyasa (2008: 25) mengemukakan bahwa "Kompetensi guru sebagai gambaran kuantitatif tentang hakikat perilaku yang penuh arti". Menurut Suyanto dan Asep Jihad (2013:39) mengemukakan bahwa : kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat dilihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya.

Mengacu pada pengertian tersebut, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat ditunjukan dalam proses belajar mengajar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya". Dalam hubungannya dengan tenaga kependidikan, kompetensi menunjuk pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tetentu dalam melaksanakan tugas kependidikan. Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi guru yang dijelaskan pada Permendiknas No.16 Tahun 2007 dikembangkan secara utuh dalam empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Kompetensi inti guru meliputi:

Kompetensi Pedagogik

**Kompetensi Pedagogik** pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Didalamnya guru harus menguasai teori-teori dan prinsip-prinsip belajar mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan serta mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di dalam kelas dan harus mampu melaksanakan kegiatan penilaian pembelajaran. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b) pemahaman terhadap peserta didik; c) pengembangan kurikulum/silabus; d) perancangan pembelajaran; e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f) evaluasi hasil belajar; g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

**Kompetensi Pedagogik** merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Berikut ini disajikan ketujuh aspek **kompetensi pedagogik** beserta indikatornya:

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
4. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik.
5. Memafaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangannyang mendidik.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Kompetensi Kepribadian

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh kepribadian yang kuat, tangguh, berperilaku sesuai dengan tata nilai dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan menjadi tauladan bagi siswanya serta menjunjung tinggi kode etik profesinya. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir b bahwa Kompetensi Kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang; a) mantap; b) stabil; c) dewasa; d) arif dan bijaksana; e) berwibawa; f) berakhlak mulia; g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; h) mengevaluasi kinerja sendiri; i) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Berikut ini disajikan kelima aspek **kompetensi Kepribadian**  beserta indikatornya:

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah (Wibowo dan Hamrin, 2012:124). Seorang guru harus berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Kompetensi Sosial yaitu merupakan kompetensi pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk; a) berkomunikaasi lisan dan tulisan; b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; c) bergaul secara efektif dengan peserta didik; sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Berikut ini disajikan keempat aspek **kompetensi Sosial**  beserta indikatornya:

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi Profesional

Pada Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan PP No. 74 Tahun 2008 menjabarkan bahwa kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang diampu. Kompetensi profesional sangat berkaitan serta dengan kemampuan guru dalam menguasai meteri pada bidang studi manapun dengan berbagai substansi keilmuan lainnya sebagai guru.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Kompetensi Profesional yaitu kemmpuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam meliputi; a) konsep, struktur, dan medote keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; c) hubungan konsep antar mata ajar yang terkait; d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Berikut ini disajikan keempat aspek **kompetensi profesional** beserta indikatornya:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran /bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dari uraian di atas maka dapat kita simpulkan bahwa guru yang profesional harus memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dengan adanya kompetensi ini diharapkan guru dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

**2.1.6. Mutu Proses**

**2.1.6.1. Pengertian Mutu Proses**

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (*Depdiknas, 2001:5*). Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain dengan mengintegrasikan input sekolah sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, dan moral kerjanya.

Mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut Depdiknas (2001: 2) dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan secara kualitatif, khususnya bidang-bidang pengetahuan sosial. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mangajar, kurikulum, sarana dan prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pandangan lain menyebutkan bahwa mutu/kualitas memiliki dua konsep yang berbeda antara konsep absolut dan relatif. Dalam konsep absolut suatu barang disebut bermutu bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Sedangkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang mampu mencapainya.

Suatu lembaga pendidikan dikatakan bermutu, diantaranya jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Peserta didik menunjukkan kadar penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar.

b. Hasil pendidikan peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya.

c. Hasil pendidikan peserta didik sesuai dengan kebutuhan lingkungan khususnya dengan dunia kerja. Karena itu relevansi menjadi salah satu indikator dari mutu.

Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang efektif yang pada intinya adalah menyangkut kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan sangat menentukan mutu hasil pembelajaran yang akan diperoleh siswa. Mutu pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu proses dan mutu hasil pembelajaran. Hadis (2010:97) menjelaskan bahwa mutu proses pembelajaran diartikan sebagai mutu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik di kelas dan tempat lainnya.

Mutu pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat mulai input (masukan), proses pendidikan yang terjadi, hingga output (produk keluaran) dari sebuah proses pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, bagi peserta didik, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

[Permendiknas No. 41 Tahun 2007](11.%20PERMENDIKNAS%20NO%2041%20TAHUN%202007%20STANDAR%20PROSES/8.Permendiknas%20No.%2041%20Tahun%202007%20Standar%20Proses.doc) tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa Standar proses meliputi: Perencanaan Proses Pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompe­tensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembela­jaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu (*Surya, 2002:12*). Proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada dalam sekolah itu sendiri dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, peralatan, dan sebagainya.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, mampu memberdayakan peserta didik.

Menurut Hari Sudradjad (2005: 17) bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompotensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), lebih lanjut Sudradjat megemukakan pendidikan bermutu  adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia   mutu didefinisikan sebagai ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas: *meningkatkan-pendidikan.* Oleh karenanya dalam konteks ini mutu diartikan sebagai ukuran kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari aspek input, proses, output bahkan outcome dari pendidikan itu sendiri.

Secara teoritis, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami arti mutu. Pertama, mutu mencerminkan suatu karekteristik yang dimiliki. Kedua yang disebut pendekatan matafisik (*metaphysical belief*), mutu dipandang sebagai sesuatu yang bisa diukur.

Pada konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup pada: masukan (input), proses, luaran (output) dan dampaknya.

a.     Mutu masukan (input) yaitu :

      sumber daya manusia, seperti  kepala sekolah, guru, staf tata usaha dan sisiwa

     alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana sekolah, dan lain-lain

input yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan perundang undangan, struktur organisasi sekolah, deskripsi kerja/tugas, rencana dan program

     Input yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi misi, motivasi, ketekunan dan cita cita, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah.

Pada sisi kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, kesisapan input merupakan tolak ukur dari mutu input yang akan diproses dalam pendidikan.

b.      Mutu proses pendidikan

*Menurut* Januszewski dan Molenda (2008:197), menyatakan bahwa  proses dilambangkan sebagai serangkaian tindakan atau prosedur atau fungsi yang mengarah kepada satu hasil yang ingin dicapai. Sebuah proses biasanya menghasilkan salah satu dari jenis hasil, yaitu sebuah produk atau proses lainnya sebagai lanjutan dari proses utama.

Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dapat dikatakan memiliki mutu yang baik apabila koordinasi dan keserasian serta pemaduan input dilakukan dengan baik sehingga mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan *(enjoyable learning)*, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan mampu memberdayakan peserta didik.

c.   Output pendidikan merupakan kinerja sekolah

Output dalam pendidikan kinerja sekolah merupakan salah satu bentuk output yang dapat diukur. Hal yang dapat diukur tersebut berupa prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/prilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur mutunya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, mutu kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Proses pendidikan dapat dikategorikan bermutu jika memiliki kriteria yang telah ditetapkan, diantaranya:

1)   Prestasi akademik seperti nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah, lomba akademik.

2)    Prestasi non akademik, misal: Iman dan taqwa, kejujuran, kesopanan, olahraga, keseniaan, keterampilan, kejuruan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya

Dari uraian masing-masing komponen dalam pendidikan tersebut maka dapatlah dipahami untuk menilai sekolah yang memiliki standar mutu yang baik tidaklah *instan* dan mudah sebab dibutuhkan keterlibatan masing-masing unsur tersebut mulai dari input, proses dan ouput, proses yang sinergis antar berbagai elemen, wujud kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan masyarakat erat, dan adanya kesadaran bersama bahwa input, proses dan ouput sekolah merupakan hasil kolektif *teamwork* yang kuat dan cerdas. Semua unsur tersebut harus berjalan seirama dan saling mendukung antara unsur yang satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, di mana pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan aktivitas siswa, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran merupakan tingkat keberhasilan dari suatu tujuan pembelajaran yang berupa perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

**2.1.7. Capaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)**

**2.1.7.1. Kriteria Ketuntasan Minimal KKM**

**a**. Pengertian KKM

Menurut Martinis Yamin, (2006 : 121), bahwa Standar ketuntasan belajar minimal atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) oleh siswa pada tiap mata pelajaran. Selanjutnya pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal belajar adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran oleh peserta didik per mata pelajaran (Khaeruddin, 2007:3)

Sekolah dapat menetapkan sendiri kriteria ketuntasan belajar sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing, dengan demikian sekolah khususnya guru mata pelajaran perlu menetapkan kriteri ketuntasan belajar dan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara berkelanjutan sampai mendekati ideal.

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Dalam Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Point A butir 10 disebutkan bahwa kriteria ketuntasan minimal (KKM) dapat dipahami sebagai “Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan” dan “KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi”. Dapat pula dikatakan bahwa, KKM merupakan “batas ketuntasan setiap mata pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah melalui analisis indikator dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik setiap indikator, dan kondisi satuan pendidikan”.

Dari pengertian di atas pada dasarnya KKM merupakan standar terendah yang harus dicapai oleh setiap siswa melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah batas minimal ketercapaian siswa dalam kompetensi setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai. Permendiknas No.20 Tahun 2007 memberikan acuan penting bahwa, KKM bagi mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UNAS menjadi instrumen untuk mengukur dan menilai kompetensi puncak siswa, sehingga sekolah dapat menentukan standar nilai yang harus dicapai siswa dan menentukan lulus atau tidaknya, siswa yang belum mencapai standar nilai dikatakan belum tuntas. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif yaitu dilakukan melalui Professional Judgment oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Dan melalui metode kuantitatif yaitu dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Adapun penetapan nilai KKMnya dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Indikator sebagai acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik UH (ulangan harian), UTS (ulangan tengah semester) maupun UAS (ulangan akhir sekolah). Dalam soal ulangan ataupun tugas tersebut harus mampu mencerminkan atau menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Seperti yang sudah terurai di atas bahwasannya dalam menentukan KKM diperlukan juga agar memperhatikan tiga komponen penting, yaitu:

a. Tingkat Kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan atau kerumitan setiap indikator,

kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari beberapa jumlah kondisi, yaitu:

1) Guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan kepada peserta didik

2) Guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi

3) Guru yang menguasai pengetahuandan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan

4) Peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi

5) Peserta didik yang cakapdan terampil menerapkan konsep

6) Peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas

7) Waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan atau latihan

8) Tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar.

Jika dalam satu indikator hanya meliputi sebagian dari kondisi di atas maka dapat dikatakan memiliki kompleksitas sedang. Sementara, ketika tidak memerlukan kondisi tersebut indikator dapat dinyatakan memiliki kompleksitas rendah

b. Tingkat Daya Dukung, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium dan alat atau bahan lain untuk proses pembelajaran. Selain sumber daya pendukung di atas ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga sangat diperlukan seperti biaya operasional pembelajaran, dukungan kebijakan, manajemen sekolah, dukungan visi, misi, tujuan dan program sekolah serta kepedulian stakeholders sekolah.

Setidaknya dalam satuan pendidikan terdapat sumber daya pendukung pembelajaran sebagaimana yang menjadi bagian dari aspek-aspek yang disupervisi seperti gedung sekolah dan bangunan-bangunan pendukungnya, fasilitas atau sarana kegiatan pembelajaran, media pembelajaran, dan seterusnya.

c. Tingkat Intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menetapkan intake peserta didik yang duduk di kelas I, VII, dan kelas X didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai ujian Nasional, rapor tingkat terakhir, tes seleksi masuk atau psikotes. Sedangkan penetapan untuk peserta didik yang duduk di kelas II dan seterusnya, VIII dan seterusnya, XI dan seterusnya berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya dengan selalu mempertimbangkan keterkaitan antara indikator dengan indikator sebelumnya yang telah dicapai oleh peserta didik.

Diantara langkah-langkah dalam menentukan KKM adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan KKM untuk setiap Indikator

b. Menetapkan KKM untuk setiap Kompetensi Dasar melalui rerata dari KKM Indikator

c. Menetapkan KKM untuk setiap Standar Kompetensi melalui rerata dari KKM Kompetensi Dasar

d. Menetapkan KKM untuk setiap aspek mata pelajaran melalui rerata dari KKM Standar Kompetensi, KompetensiDasar dan Indikator yang telah dipetakan berdasarkan aspek.

e. Hasil penetapan KKM oleh guru atau MGMP disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian

f. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak yangberkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua dan dinas pendidikan.

g. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua.

Penetapan kriteria minimal ketuntasan belajar merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi yang menggunakan acuan kriteria dalam penilaian, mengharuskan pendidik dan satuan pendidikan menetapkan kriteria minimal yang menjadi tolok ukur pencapaian kompetensi. KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap.

Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik

**B. Fungsi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)**

a. Fungsi kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu :

1. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai

kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti.

2. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian

mata pelajaran.

3. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi

4. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat.

5. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran.

b. Fungsi KKM dalam Pembelajaran

Beberapa fungsi dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) dalam pembelajaran antara lain:

1. Bisa menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan. Selain itu dapat digunakan sebagai bagian dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.

2. Bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui kompetensi dasar apa saja yang belum tuntas dan perlu perbaikan.

3. Dengan KKM dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolok ukur.

4. Menentukan KKM merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan siswa dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara guru, siswa, pimpinan satuan pendidikan dan orang tua. Guru melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Siswa melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain guru. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi anak-anaknya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah.

e. KKM merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan yang memiliki KKM tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan.

**2.1.7.2. Capaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) Guru**

Arti dari capaian menurut KBBI adalah : nomina (kata benda) hasil perbuatan mencapai. Capaian berasal dari kata dasar [capai](https://www.apaarti.com/capai.html), capaian memiliki arti dalam kelas [nomina](https://www.apaarti.com/nomina.html) atau kata benda sehingga capaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. KKM adalah suatu kriteria acuan pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa permata pelajaran. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolak ukur. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh menurut internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Pengertian Guru atau disebut juga dengan pendidik menurut KBBI ialah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, dan profesinya adalah mengajar. Sedangkan pengertian guru dalam UU no.14 Tahun 2005 yaitu seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.Sementara menurutDri Atmaka (2004: 17) pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Agar tercapai tingkat kedewasaan mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai mahluk Tuhan, mahluk sosial dan mahluk individu yang mandiri. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian KKM guru adalah hasil yang dicapai guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan tolak ukur keberhasilan atau kemampuan siswa dalam pencapaian kompetensi dasar setiap mata pelajaran.

Pencapaian kriteria ketuntasan minimal perlu dianalisis oleh guru untuk dapat ditindak lanjuti sesuai dengan hasil yang diperoleh. Guru menindak lanjuti untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun penilaian. Hasil analisis ketercapaian KKM juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan KKM pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya. Analisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan. Setelah selesai melaksanakan penilaian setiap KD harus dilakukan analisis pencapaian KKM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis rata-rata hasil pencapaian peserta didik kelas VII, VIII, atau IX terhadap KKM yang telah ditetapkan pada setiap mata pelajaran. Melalui analisis ini akan diperoleh data antara lain:

1. KD yang dapat dicapai oleh 75% - 100% dari jumlah peserta didik pada kelas VII, VIII, atau IX.

2. KD yang dapat dicapai oleh 50% - 74% dari jumlah peserta didik pada kelas VII, VIII, atau IX.

3. KD yang dapat dicapai oleh ≤ 49% dari jumlah siswa peserta didik kelas VII,

VIII, atau IX.

Manfaat hasil analisis untuk guru adalah sebagai dasar untuk meningkatkan kriteria ketuntasan minimal pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya. Analisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data perolehan nilai setiap peserta didik per mata pelajaran. KKM yang ideal sangat bermanfaat untuk menganalisis ketidakmampuan siswa dalam menuntaskan proses pembelajarannya. Siswa yang tidak mampu ini nanti akan dibina kembali untuk menuntaskan syarat minimal indikator yang diraih sesuai kemampuannya. Karena tak semua siswa adalah manusia yang berbakat di setiap bidang pelajaran tapi tetap harus ada standar minimal agar mereka dapat menuntaskan pembelajaran. Kenyataan banyak siswa yang masih belum tuntas dan belum memenuhi standar KKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah yang dihadapi siswa yang nilainya di bawah KKM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : Faktor yang berasal dari diri siswa (internal), Faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal). 3) Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa permata pelajaran. Siswa yang belum mencapai nilai KKM dikatakan belum tuntas (Widyaiswara P4TK Matematika Yogyakarta, 2008:2). Pencapaian KD dan TP mencerminkan kuantitas penyerapan materi pelajaran oleh siswa, sehingga proporsi penyerapan materi dan proporsi siswa yang mencapai suatu nilai tertentu ditetapkan sebagai standar keberhasilan pembelajaran (Johar dkk, 2006:184).

* + 1. **Hasil Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1.

Peneliti dan Judul Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | | Peneliti | Judul Penelitian | | | |
| 1. | | [Saifuddin](http://jurnal.upi.edu/educationist/author/saifuddin), 2011, jurnal | Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah (Telaah Konseptual Kurikulum Pendidikan Menengah yang mencerahkan) | | | |
| 2. | | Sudadio, 2012, jurnal | Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Banten Melalui Manajemen Berbasis Sekolah | | | |
| 3. | | M. Arif Khoirudin, 2013, Jurnal | Manajemen Kurikulum dalam Meningkat kan Mutu Pendidikan | | | |
| 4. | | A. Samad Usman, 2014, Jurnal | Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah | | | |
| 5. | | Sarwono, 2014, Jurnal | Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Melalui Loka Karya di SMP Negeri 8 Tebing Tinggi | | | |
| 6. | | Kasypul Anwar, 2015, Jurnal | Pelaksanaan Manajemen Proses pembelajaran dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa | | | |
| 7. | | Ginayanti Tri Lestari  2015, Tesis | Pengaruh Kompetensi Guru dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Guru Serta Implikasinya Pada Hasil Belajar Siswa di SMA Pasundan 8 Bandung | | | |
| 8. | | Reksa Setiawan1, Arief Noviarakhman Zagladi2 2015  . | Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa | | | |
| 9. | | Hasrian Rudi Setiawan, 2016, Jurnal | Antara Kurikulum dan Mutu Pendidikan di Indonesia | | | |
| 10. | | Zuhri Zargobban, 2016, Tesis | Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Budaya Sekolah Dan Kompetensi Guru Implikasinya pada Kinerja Guru SMP Darul Musyawirin Kab. Cirebon | | | |
| 11. | | Samsila Yurni, H. Erwin Bakti ,2016, Jurnal | Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan | | | |
| 12. | | Patimah, 2016, Jurnal | Pendidik dalam Pengembangan Kurikulum | | | |
| 13. | | Ketut Bali Sastrawan, 2016, Jurnal | Profesionalisme Guru Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran | | | |
|  | | | | | | |
| No | Hasil Penelitian | | | Persamaan |  |
| 1. | Model pengembangan kurikulum melalui beberapa tahap diantaranya :  (1) tahap penguasaan manajemen pengembangan kurikulum;  (2) tahap pemahaman cara pandang kurikulum;  (3) tahap yang tidak kalah penting adalah penguasaan TQM. Ketiga tahapan tersebut harus dimiliki setiap guru dalam rangka inisiatif mengembangkan kurikulum yang kontekstual dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat pada umunya. Kurikulum berorientasi masa depan pendidikan menengah hendaknya diarahkan pada: (1), integrasi pelajaran bahasa, seni dan olahraga. Karena pelajaran ini mendorong daya kreativitas dan kemampuan diri yang dikembangkan;(2), Metode pembelajaran bagi siswa pendidikan menengah yang benar adalah lebih banyak porsi untuk dialog dan diskusi; (3), kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai alternatif kurikulum berorientasi masa depan masih harus dikembangkan oleh pihak sekolah (guru, kepala sekolah, dan komite sekolah) sehingga mengarah kepada akar budaya setempat. | | | Penelitian dalam pengembangan kurikulum, | Pembahasan kompetensi guru, mutu proses dan capaian KKM guru |
| 2. | Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa; 1) upaya peningkatanan mutu pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah pada pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Banten, dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan telah menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam mengelola Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, yaitu rata-rata lima komponen (0,635), dari delapan komponen garapan MBS, dan 2)kontribusi manajemen berbasis sekolah terhadap prestasi ujian nasional pada pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Banten, dinyatakan berpengaruh dengan besaran kontribusi adalah masing-masing 0,216 persen untuk sekolah dasar, dan 0,242 persen untuk sekolah menengah pertama serta 0,202 persen untuk sekolah menengah atas, atau rata-rata 0,229 persen untuk pendidikan dasar dan 0,202 persen untuk pendidikan menengah. | | | Pembahasan penelitian pada mutu pendidikan yang selaras dengan mutu proses | Penelitian ini tidak membahas kurikulum, kompetensi guru, capaian KKM guru |
| 3. | Mutu pendidikan akan memuaskan jika pengelolaan komponen-komponen pendidikan yang meliputi landasan, tujuan, kurikulum, kompetensi dan profesionalis-me guru, pola hubungan guru murid, pembiayaan dan unsur lainnya direncanakan secara matang. Untuk mencapai suatu pendidikan yang baik dan berkualitas maka perlu adanya sebuah manajemen yang baik terutama dibidang kurikulum yang akan diajarkan kepada anak didik baik mengenai tujuan, isi atau bahan ajar, pelaksanaan serta evaluasi dari kurikulum. Dengan menerapkan manajemen kurikulum secara profesional lembaga pendidikan tersebut akan menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu membentuk lulusannya agar memiliki kecakapan hidup. | | | Penelitian ini sama- sama membahas tentang kurikulum yang menekankan pada manajemen kurikulum | Penelitian ini tidak membahas kompetensi guru, mutu proses dan capaian KKM guru. |
| 4. | Manajemen pendidikan nasional di Indonesia secara keseluruhan masih cenderungterpusat sehingga perkembangan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan kurang menggembirakan. Masalah manajemen pendidikan pada dasarnya menyangkut efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Manajemen pendidikan nasional adalah strategi yang perlu ditata ulang untuk mengatasi efek negatif dari globalisasi. Revitalisasi manajemen ini sekaligus akan mengarahkan globalisasi ke arah yang positif bagi perkembangan peradaban bangsa. Selama ini sistem manajemen terpusat dari pendidikan terbukti tidak membawa kemajuan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, manajemen terpusat telah menghambat kreativitas satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang. | | | Penelitian ini menunjukkan kesamaan dalam bidang mutu proses pendidikan | Penelitian ini tidak membahas pengembangan kurikulum, kompetensi guru dan capaian KKM guru |
| 5. | Masalah dalam penelitian ini adalah guru dalam menetapkan KKM  tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan prinsip serta langkah-langkah penetapan, oleh karena itu perlu ada kegiatan pada awal tahun pelajaran yang dapat memberikan informasi kepada Guru yang dijadikan pedoman dalam penetapan KKM. Lokakarya merupakan proses perbantuan  (facilitating) Guru untuk mendapatkan keefektivan dalam tugas-tugas mereka sekarang dan masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan berfikir, bertindak, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai. | | | Persamaan peneletian ini yaitu fokus pada KKM | Penelitian ini tidak melihat hubungan pengembangan kurikulum dan mutu proses pada capaian KKM |
| 6. | Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan,  proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting. Sebab, bagaimanapun idealnya standar isi dan standar kopetensi lulusan serta standar-standar lainnya, tanpa didukung oleh standar proses yang memadai, maka standar-standar tersebut tidak akan memiliki nilai. Dalam konteks itulah standar proses pembelajaran merupakan hal yang harus diperhatikan. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran.Berkaitan dengan prestasi belajar, maka secara substantif peningkatannya harus dipusatkan pada proses pendidikan, proses pendidikan yang paling dominan berpengaruh adalah binaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai komponen pendukungnya, yaitu manajemen pendidikan, profesionalisme guru, sarana belajar, fisik sekolah serta partisipasi masyarakat, karena penyelenggaraan proses belajar mengajar merupakan kunci dalam menghasilkan pendidikan bermutu. | | | Persamaan penelitian ini yaitu tentang mutu proses pembelajaran | Penelitian tidak mengaitkan denganpengembangan kurikulum, kompetensi guru dan capaian KKM guru |
| 7. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung secara signifikan kompetensi guru terhadap kinerja guru, selain itu hasil penelitianpun menunjukkan iklim organisasi mempengaruhi secara tidak signifikan terhadap kinerja guru berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya pengaruh Kompetensi Guru dan Iklim Organisasi secara simultan terhadap kinerja guru terhadap hasil belajar siswa. | | | Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti kompetensi guru | Perbedaan penelitian ini yaitu tentang pengembangan kurikulum, mutu proses , capaian KKM guru |
| 8. | Peran guru sebagai tenaga pendidik mengharuskan mereka untuk memiliki serangkaian kompetensi yang mumpuni untuk menjaga atau meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kompetensi mengajar guru terhadap motivasi siswa dalam menuntut ilmu. Kompetensi mengajar dalam penelitian ini dibagi menjadi kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Penelitian dilakukan pada SMP Kartika V-3 Banjarmasin dengan melibatkan 90 siswa sebagai responden penelitian. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel yang memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa hanya variabel kompetensi sosial, ini artinya kompetensi sosial adalah variabel yang berpengaruh dominan terhadap motivasi belajar siswa. Hasil uji secara simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan, tetapi memiliki koefisien determinasi yang sangat rendah, sehingga semakin menegaskan temuan bahwa kompetensi mengajar guru tidak banyak berperan dalam menentukan motivasi belajar siswa. | | | Persamaan penelitian ini mengenai Kompetensi guru | Perbedaan penm dan pelitian ini tidak menghubungkan dengan pengembangan kurikulum, mutu proses, capaian KKM guru |
| 9. | Merubah kurikulum/ merevisi kurikulum merupakan hal yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun yang lebih penting lai adalah memperhatikan serta meningkatkan kompetensi mengajar yang dimiliki oleh guru. | | | Bahan penelitian sama yaitu kurikulum dan mutu pendidikan | Penelitian ini mencari hubungan antara kurikulum dan mutu pendidikan |
| 10. | Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap Kompetensi, Budaya Sekolah berpengaruh terhadap Kinerja Guru, Kompetensi Guru bepengaruh terhadap Kinerja Guru, Budaya Sekolah dan Kompetensi Guru secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Guru | | | Persamaan penelitian ini yaitu tentang kompetensi guru berpengaruh terhadap kinerja guru yang berdampak pada prestasi siswa | Perbedaan penelitian ini yaitu pengembangan kurikulum, mutu proses dan capaian KKM guru |
| 11. | Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dikembangkan dan dinilai secara terus menerus berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada dimasyarakat. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan berjalan. Sehingga dalam penyusunan pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan langkah -langkah sebagai berikut: Perumusan Tujuan.; Menentukan Isi.; Memilih Kegiatan.; dan Merumuskan Evaluasi. Sehingga dalam penyusunan pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan langkah-langkah : 1) Perumusan Tujuan,  2) Menentukan Isi, 3) Memilih Kegiatan,4) Merumuskan Evaluasi. Dengan beberapa model, seperti; model Beauchamp yang dikenal dengan model terbalik, Hida Taba, dan banyak lagi model menurut akhli -akhli yang dapat dijadikan referensi bagi guru maupun sekolah untuk melakukan pengembangan kurikulum dan didasarkan pada karakteristik wilayah atau daerah. | | | Persamaan penelitian ini tentang pengembangan kurikulum, mutu proses | Perbedaan penelitian ini tidak menghubungkan dengan kompertensi guru dan capaian KKM guru |
| 12. | Guru merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kurikulum, karena gurulah yang secara langsung berhadapan dengan siswa (subjek kurikulum 2013) dalam proses pembelajaran. Dalam Bahan Uji Publik Kurikulum 2013 disebutkan bahwa kondisi saat ini pendidik dan tenaga kependidikan hanya memenuhi kompetensi profesi dan hanya berfokus pada ukuran kinerja saja, padahal seharusnya seorang pendidik harus memenuhi kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal serta memiliki motivasi mengajar. Sehingga kurikulum yang sudah dirancang dapat terlaksana dengan baik. | | | Persamaan penelitian ini mengeanai pengembangan kurikulum dan kompetensi guru | Perbedaan penelitian ini tidak menghubungkan dengan mutu proses dan pencapaian KKM guru |
| 13. | Profesionalitas dituntut di setiap pekerjaan. Tanpa pengecualian profesi pengajar yang setiap hari bergelut dengan masa depan anak-anak bangsa dengan berbagai karakter yang berbeda. Guru adalah komponen terpenting dalam proses pembelajaran. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, peranan guru adalah sebagai demonstrator, pengatur kelas, moderator, fasilitator dan evaluator.  Guru yang profesional sangat penting karena mereka yang mempunyai profesionalitas mempunyai kapasitas yang beragam sebagai pengajar . Guru dengan profesionalitasnya akan mampu meningkatkan proses pembelajaran sehingga kualitas proses pembelajaranpun akan meningkat. | | | Persamaan penelitian ini mengeanai kompetensi guru dan mutu proses | Perbedaan penelitian ini tidak menghubungkan dengan pengembangan kurikulum dan pencapaian KKM guru |

* 1. **Kerangka Pemikiran** 
     1. **Hubungan Pengembangan Kurikulum dan Kompetensi Guru**

Kurikulum memegang kedudukan kunci dalam pendidikan, sebab berkaitan dengan arah, isi dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Dalam suatu lembaga pendidikan, salah satu tokoh yang memiliki peranan yang begitu penting dalam pengembangan kurikulum adalah guru. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan yang terlibat langsung dalam mengembangkan, memantau, dan melaksanakan kurikulum sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak berarti menyurutkan peranan guru. Bahkan hasil – hasil teknologi tersebut akan menambah beban tugas dan tanggung jawab guru. Oleh karenanya, guru sebagai pelaku utama pendidikan diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagai pendidik profesional, dan tentu saja sebagai pengembang kurikulum.

Dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat di bedakan antara sifat yang bersifat sentralisasi, desentralisasi dan sentraldesentral. Pembagian kategori ini tentu saja akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pengembangan kurikulum.

Berikut ini uraian lebih lanjut tentang peranan guru dalam pengembangan kurikulum, yaitu :

1. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi tugas guru adalah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan tahap perkembangan anak, memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi serta menyusun program dan alat evaluasi yang memudahkan guru dalam implementasinya. Walaupun kurikulum sudah tersusun dengan berstruktur tetapi guru masih mempunyai tugas untuk mengadakan penyempurnaan dan penyesuaian-penyesuaian. Guru dan Pengembangan Kurikulum Implementasi kurikulum hampir seluruhnya bergantung pada kreatifitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru. Guru hendaknya mampu memilih dan menciptakan situasi-situasi belajar yang menggairahkan siswa, mampu memilih dan melaksanakan metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa, bahan pelajaran dan banyak mengaktifkan siswa, guru hendaknya mampu memilih, menyusun dan melaksanakan evaluasi baik untuk mengevaluasi perkembangan atau hasil belajar siswa untuk menilai efisiensi pelaksanaannya itu sendiri.

2. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini di dasarkan pada karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Bentuk kurikulum seperti ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan – kelebihannya adalah Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional, finansial maupun manajerial. Disusun oleh guru-guru sendiri dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Ada motivasi kepada kepada sekolah untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya, dengan demikian akan terjadi semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Adapun beberapa kelemahannya adalah 1) guru dan pengembangan kurikulum, tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional, 2) tidak adanya standar penilaian yang sama sehingga sukar untuk diperbandingkan keadaan dan kemajuan suatu sekolah/wilayah dengan sekolah/wilayah lainnya, 3) adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa ke sekolah / wilayah lain, 4) sukar untuk mengadakan pengeloaan dan penilaian secara nasional, 5) belum semua sekolah atau daerah mempunyai kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri.

Dengan terlaksananya fungsi-fungsi kompetensi keprofesionalan seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional diharapkan menjadi representasi dalam mengggambarkan kinerja guru yaitu pekerjaan seorang guru melampaui dari apa yang diharapkan. Sergiovanni dalam Pupuh Fathurrohman (2012:32) mengatakan kinerja guru erat kaitannya dengan peningkatan pemberdayaan guru tersebut dimana guru harus dapat mengkritisi kurikulum secara mandiri, dapat mengelola kelas dan bahan ajarnya serta dapat meningkatkan cara mengajarnya secara efisien. Oleh karena tugas dan kedudukan yang dibebankan pada guru, maka guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskara Aji, "Kurikulum eksekusinya di tangan guru. Karenanya guru berperan besar dalam implementasinya,". Menurutnya, peran guru dalam mengaplikasikan kurikulum baru memang dibutuhkan saat ini. Sebab kurikulum yang diterapkan pada peserta didik dibuat tidak hanya oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) namun juga banyak pihak, termasuk para guru. Maka dari itu, untuk mensukseskan penerapan kurikulum tersebut, guru menjadi faktor yang paling dominan untuk dilaksanakan. Para pendidik itulah yang mengetahui perkembangan ilmu dan perubahan materi kurikulum yang dibutuhkan. Menurut Murray peran guru dalam kurikulum adalah sebagai berikut: (Sumardi, 2009: 19). Pertama, sebagai implementers, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya kurikulum bersifat seragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu guru hanya sekadar pelaksana kurikulum, maka tingkat kreatifitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaruan. Kedua, peran guru sebagai adapters, lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan KTSP dimana para perancang kurikulum hanya menentukan standat isi sebagai standar minimal yang harus dicapai, bagaimana implementasinya, kapan waktu pelaksanaannya, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapters lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementers. Ketiga, peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Keempat, adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum (curriculum researcher). Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektifitas program, menguji strategi dan model pembelajaran dan lain sebagainya termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum.

Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah PTK dan Lesson Study. Definisi Pengembangan Kurikulum pada dasarnya pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam diri sendiri dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Definisi lain menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber unit.

**2.2.2. Pengaruh Antara Pengembangan Kurikulum Terhadap Mutu Proses**

Sekolah merupakan bagian dan agen dari masyarakat, oleh sebab itu sekolah perlu mempersiapkan anak didik untuk kehidupan dimasyarakat. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, sehingga dituntut untuk perbaikan sistem pendidikan termasuk penyempurnaan kurikulum. Tujuan dari pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, (Widyastono,2014;63). Menurut Widyastono, (2014;63) untuk menigkatan mutu pendidkan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, seperti: aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga dan prilaku. Jadi isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi-kondisi di atas sehingga dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu (*Surya, 2002:12*). Mutu pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu proses dan mutu hasil pembelajaran. Hadis (2010:97) menjelaskan bahwa mutu proses pembelajaran diartikan sebagai mutu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik di kelas dan tempat lainnya.

Mutu pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat mulai input (masukan), proses pendidikan yang terjadi, hingga output (produk keluaran) dari sebuah proses pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, bagi peserta didik, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan). Input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. [Permendiknas No. 41 Tahun 2007](11.%20PERMENDIKNAS%20NO%2041%20TAHUN%202007%20STANDAR%20PROSES/8.Permendiknas%20No.%2041%20Tahun%202007%20Standar%20Proses.doc) tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa Standar proses meliputi: Perencanaan Proses Pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompe­tensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembela­jaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu (*Surya, 2002:12*). Proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang akan ada dalam sekolah itu sendiri dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, peralatan, dan sebagainya.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, mampu memberdayakan peserta didik.

Menurut Hari Sudradjad (2005: 17) bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompotensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*), lebih lanjut Sudradjat megemukakan pendidikan bermutu  adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia   mutu didefinisikan sebagai ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas: *meningkatkan-pendidikan.* Oleh karenanya dalam konteks ini mutu diartikan sebagai ukuran kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari aspek input, proses, output bahkan outcome dari pendidikan itu sendiri.

**2.2.3. Pengaruh Antara Kompetensi Guru Terhadap Mutu Proses**

Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Dengan begitu, kompetensi yang dimiliki oleh guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi diartikan pula sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebisaaan berpikir dan bertindak. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan ada empat (4) kompetensi guru yaitu: 1. Kompetensi Pedagogik, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan perencanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi Kepribadian, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 3. Kompetensi Profesional, kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan. 4. Kompetensi Sosial, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Guru, didalam proses pembelajaran memang memegang peranan yang sangat penting. Peran guru, apalagi untuk peserta didik pada usia pendidikan dasar, tidak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain seperti televisi, radio, komputer dan lain sebagainya. Sebab peserta didik adalah organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarnya tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran (manager of learning). Dengan demikian efektifitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru. Banyak hal yang dapat mempengaruhi dalam proses belajar peserta didik sehingga menentukan kualitas hasil belajar mereka, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Keberhasilan seorang peserta didik dalam meraih prestasinya tidak terlepas dari keberhasilan guru yang mendidiknya. Guru yang sukses mendidik para peserta didiknya memiliki kemungkinan melahirkan seorang peserta didik yang berprestasi. Hal ini penting didahulukan karena keberadaan guru yang profesional dan berkualitas akan sangat menentukan muncul atau tidaknya nilai prestasi peserta didik. Eksistensi seorang guru tidak hanya dituntut untuk memberikan pengajaran sesuai bidang yang menjadi keahliannya, namun selain itu kehadiran seorang guru juga dituntut menjadi suri tauladan yang baik bagi para peserta didiknya. Barometer yang digunakan untuk mengukur kualitas seorang guru salah satunya dengan melihat tingkat keahlian yang dimilikinya, yang kita sebut dengan profesionalisme. Sebuah bidang mata pelajaran seharusnya dipegang oleh mereka yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Hal ini akan memberkan peluang bagi terselenggarakannya proses belajar mengajar yang efektif dan kondusif, selain itu juga memberi peluang bagi tuntasnya pelajaran untuk dipelajari secara mendalam. Seorang guru dituntut untuk dapat mengelola (manajemen) kelas, menggunakan metode mengajar, strategi mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru selaku pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar yang efektif, mengembangkan bahan pengajaran dengan baik, dan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Namun begitu ada hal lain juga yang bisa kita jadikan ukuran untuk menilai mutu serta kualitas seorang guru, yaitu dengan melihat sepak terjang kepribadian, perilaku, watak, karakter maupun sikap-sikapnya. Dalam proses pendidikan memang tidak terpaku hanya pada penyampaian dan tersampaikannya materi saja kepada peserta didik, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana guru dapat menularkan sikap-sikap dan perilaku yang baik kepada para peserta didiknya. Bagaimanapun kita tidak bisa berharap banyak akan terjadi proses pembelajaran yang efektif dan kondusif serta dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi jika para gurunya adalah orang-orang yang yang tidak profesional dalam mengajar, kepribadiannya tidak etis dan jauh dari suri tauladan yang dapat digugu dan ditiru peserta didik atau siswa-siswinya. Singkatnya kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme guru ataupun pendidiknya. Menurut Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 ayat 2 (2003: 27) bahwa : “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.Guru yang profesional harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran.guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang Guru dan Dosen (2006:7) Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan empat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki setiap guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam bentuk perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hamalik (2008: 36) menyatakan bahwa: ”Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelas, sehingga belajar peserta didik bertingkat optimal.” Dari pernyataan tersebut dinyatakan bahwa seorang guru harus mampu mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran sehingga mutu proses pembelajaran akan dicapai secara optimal.

**2.2.4. Pengaruh Antara Mutu Proses dengan Capaian KKM Guru**

Mutu pendidikan mempunyai makna sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu (*Surya, 2002:12*). Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, peralatan, dan sebagainya.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, mampu memberdayakan peserta didik.

Menurut Hari Sudradjad (2005: 17) bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (*life skill*).

Dalam Permendiknas disebutkan bahwa salah satu prinsip penilaian dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah beracuan kriteria. Hal ini berarti bahwa penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran sebagai dasar dalam menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Penetapan kriteria ketuntasan minimal belajar merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar dan merupakan salah satu indikator yang diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan Kriteria Ketuntasan Minimal belajar adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran oleh peserta didik per mata pelajaran (Khaeruddin, 2007:3)

1. Dalam pedoman KTSP model BSNP, pada muatan kurikulum mengharuskan adanya Kriteria Ketuntasan Belajar.

2. Dikandung maksud bahwa dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditargetkan oleh masing-masing mata pelajaran pada suatu satuan pendidikan, akan dapat meningkatkan prestasi peserta didik melalui penguasaan materi pembelajaran sesuai dengan target, baik secara kognitif afektif maupun psikomotorik, sehingga kemampuan peserta didik dapat terukur dan meningkat secara bertahap, dan pada giliranya akan dapat meningkatkan mutu lulusan.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam muatan kurikulum merupakan dokumen dan acuan yang harus ada dan dipersyaratkan dalam KTSP, oleh karena itu sekolah/madrasah harus menetapkan KKM, dan tercapai memenuhi standar nasional.Satuan pendidikan harus barupaya mendesain programnya untuk mencapai KKM yang lebih tinggi, dengan KKM yang tinggi akan menunjukkan kualitas sekolah tersebut.

KKM masih dilihat secara apriori sehingga belum memberi dampak yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan, implementasi KKM diasumsikan sebagai istilah baru, kurangnya pemahaman terhadap pedoman KKM dan perbedaan peresepsi dalam menafsirkan KKM hanya menambah sederet permasalahan baru bagi guru dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan KKM. Hal ini tampak dari rendahnya nilai KKM yang dicapai oleh beberapa mata pelajaran tertentu yang masih jauh dari KKM nasional.Itu berarti bahwa penetapan KKM mata pelajaran tidak memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kegiatan proses belajar mengajar dan pencapaian standar ketuntasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana yang diharapkan.

Nilai ketuntasan minimum per mata pelajaran dan per kompetensi dasar dan per indikator ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dan kedalaman mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Setiap mata pelajaran dapat berbeda nilai minimal ketuntasannya.

KKM Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan yang memiliki KKM tinggi dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan (Direktorat PAI: 166-167). KKM yang ideal sangat bermanfaat untuk menganalisis ketidakmampuan siswa dalam menuntaskan proses pembelajarannya. Siswa yang tidak mampu nanti akan dibina kembali untuk menuntaskan syarat minimal indikator yang diraih sesuai kemampuannya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas peneliti dapat memberikan gambaran tentang paradigma penelitian sebagai berikut :

**Pengembangan kurikulum**

1. Prinsip Pengembangan Kurikulum
2. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Permen Diknas RI No. 22 Tahun 2006

H. Widyastono, (2014;63)

Khaeruddin,

2007:3

**Capaian KKM Guru**

1. Prinsip Penetapan KKM
2. Langkah-Langkah Penetapan KKM
3. Penentuan KKM

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional

**Mutu Proses**

1. Merencanakan proses belajar mengajar
2. Melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar
3. Evaluasi dan Penilaian

Permen Diknas No. 41 Tahun 2007, dan

Permen Diknas No. 22 Tahun 2016

Sumardi, 2009: 19

**Kompetensi Guru**

1. Kopetensi Utama
2. Kompetensi Pedagogik
3. Kompetensi Kepribadian
4. Kompetensi Sosial
5. Kompetensi Profesional

Permen Diknas No.16 Tahun 2007

Hamalik (2008: 36)

Gambar 2.1.

Paradigma Penelitian

**2.3. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah dan uraian kerangka pemikiran diatas , maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pengembangan kurikulum terhadap mutu proses
2. Terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap mutu proses
3. Terdapat pengaruh pengembangan kurikulum dan kompetensi guru terhadap Mutu proses
4. Terdapat pengaruh mutu proses terhadap capaian KKM guru